

Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Di Kabupaten Purwakarta

Hamdan Yuafi ^a, Deddy Mulyadi ^b, Teni Listiani ^c

^a Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta

^{b,c} Politeknik STIA LAN Bandung

Email : ^a Hamdanyuafi1994@gmail.com, ^b demul010@gmail.com ^c teni.listiani@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan taman bacaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta dan mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan taman bacaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sampel pada penelitian ini berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan TBM di Kabupaten Purwakarta belum berjalan secara efektif, masyarakat belum menjadikan taman baca sebagai wahana edukasi karena minimnya koleksi bahan bacaan yang tidak memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Selain itu dilihat dari faktor sumberdaya, kualitas SDM belum memadai hal ini didukung karena adanya keterbatasan anggaran. Kepentingan akan kebutuhan primer menjadikan masyarakat kurang perhatian akan budaya literasi. Sehingga dalam rangka menciptakan harmonisasi regulasi dengan mitra yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disipusda) Kabupaten Purwakarta, perlu adanya integrasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan non-formal melalui penyusunan Peraturan Daerah (*updating*) yang baru mencakup pengelolaan sumber daya termasuk pembagian peran antar stakeholder.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Taman Baca Masyarakat (TBM), Literasi

Policy Implementation Model For The Community Reading Park (TBM) Development In Purwakarta District

Abstract

*The purpose of this study was to determine the implementation of policies for the development of public reading gardens in Purwakarta Regency and to identify the driving and inhibiting factors in the implementation of the community reading garden development policy. In addition, this research will also formulate a model for implementing policies for the development of reading gardens. The method used is descriptive qualitative research methods. The sample in this study is located in Purwakarta Regency. The results of this study indicate that the implementation of the TBM development policy in Purwakarta Regency has not been effective, the community has not made reading parks as a vehicle for education because of the lack of reading material collections that do not meet the information needs of the community. In addition, seen from the resource factor, the quality of human resources is not adequate. This is supported by budget constraints. The interest in primary needs makes people less concerned about literacy culture. So that in order to create regulatory harmonization with partners carried out by the Office of Archives and Libraries (Disipusda) of Purwakarta Regency, it is necessary to integrate policies for the implementation of non-formal education services through the formulation of new Regional Regulations (*updating*) which cover resource management including the division of roles between stakeholders.*

Keywords: Policy Implementation, Community Reading Park (TBM), Literacy

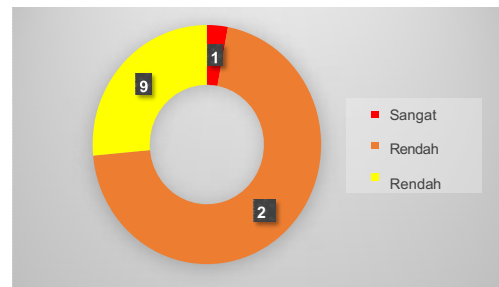
1. PENDAHULUAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA (*Programme for International Student*) pada tahun 2018 mengemukakan bahwa Indonesia ada di peringkat ke - 72 dari 78 negara yang dievaluasi sistem pendidikannya dengan cara mengukur kinerja siswa pada jenjang pendidikan menengah, terutama pada tiga bidang utama yaitu literasi, matematika dan sains (Kompas.com, 28 November 2020). Dari hasil penelitian tersebut ada beberapa catatan yang menarik untuk dianalisis. Pertama, kemampuan membaca siswa Indonesia adalah yang terendah dibanding kemampuan dalam bidang matematika dan sains. Merujuk pada Skor PISA bahwa nilai kemampuan membaca siswa Indonesia adalah 371 tertinggal 116 poin dari rata-rata negara lain yaitu 487. Sedangkan nilai kemampuan Matematika sebesar 379, lebih rendah 110 poin dari nilai rata-rata negara lain yaitu 489 dan nilai sains adalah 396, lebih rendah 93 poin dari nilai rata-rata PISA sebesar 489. Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia adalah kompetensi yang seharusnya paling mendapat perhatian karena memiliki nilai yang paling rendah.

Terkait dengan kondisi minat baca di Indonesia terdapat beberapa data yang menyebutkan bahwa di tahun 2012 Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Data lain menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional RI melansir data serupa terkait jumlah buku yang dibaca masyarakat Indonesia yang sangat rendah dibandingkan Negara anggota ASEAN lainnya. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun, sementara Negara ASEAN lainnya membaca dua sampai tiga buku dalam setahun. Bila dibandingkan dengan warga Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun dan warga Jepang membaca 10-15 buku setahun dan Indonesia hanya memiliki terbitan buku sebanyak 50 juta per tahun dengan jumlah penduduk 250 juta orang. Artinya, rata-rata satu buku di Indonesia dibaca oleh lima orang.

Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang (angka indeks antara 40,01 - 60,00); 24 provinsi (71%) masuk kategori rendah (20,01 - 40,00); dan 1 provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah (0 - 20,00). Artinya sebagian besar provinsi berada pada level aktivitas literasi rendah dan tidak satu pun provinsi termasuk ke dalam level

aktivitas literasi tinggi dan sangat tinggi (nilai indeks antara 60,01 - 80,00 dan 80,01 - 100,00).



Grafik I.1. Jumlah Provinsi Menurut Tingkat Aktivitas Literasi.

Sumber : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Purwakarta, diperoleh informasi mengenai beberapa isu dan masalah sosial yang berkembang di Kabupaten Purwakarta saat ini. Namun karena adanya berbagai keterbatasan maka dari sejumlah isu dan masalah sosial yang ada, dipilih salah satu isu dan masalah sosial untuk dijadikan bahan kajian. Adapun isu dan masalah sosial tersebut adalah Rendahnya Minat Baca Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari angka Angka Melek Huruf tahun 2018 sebesar 96% (BPS Kabupaten Purwakarta, 2018). Berikut ini akan dipaparkan sesuai data yang penulis kutip dari Data Makro Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta tahun 2019, yaitu : Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 hanya sebesar 96%. Sedangkan realisasi angka melek huruf pada tahun 2019 sebesar 96,34. Angka ini memang mengalami kenaikan pada tahun 2018 yang sebesar 96 tetapi angka tersebut kurang sesuai dengan proyeksi target 2019 yang diharapkan akan mencapai angka 96,40.

Penyelesaian permasalahan rendahnya minat baca dan melek huruf menjadi perhatian pemerintah karena budaya literasi masyarakat yang terhalang oleh akses dan media menjadi salah satu penghambat kegiatan penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Membaca Buku (Germas Buku) sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal menyatakan bahwa Program Pendidikan

Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sehingga dalam melaksanakan layanan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga satuan pendidikan nonformal yang telah disebutkan pada pasal 3 bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri dari Kelompok Belajar (Kober), Majelis Taklim (MT), Rumah Pintar, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan sebagainya.

Berdasarkan peraturan tersebut upaya mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi agar menjadi manusia berilmu, inovatif, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab dengan program pendidikan yang terus berkembang melalui metode - metode yang disempurnakan guna memfasilitasi masyarakat dalam proses mendapatkan wawasan pengetahuan, salah satunya dengan kegiatan membaca pada kegiatan penyelenggaraan layanan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang penelitian mengenai implementasi kebijakan taman bacaan ini penting dilakukan. Pertama, United Nations Development Programme (UNDP) telah menjadikan angka melek huruf sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas suatu bangsa. Indikator tersebut didasarkan pada tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) melalui tinggi rendahnya melek huruf masyarakat. Sedangkan tinggi rendahnya HDI menentukan kualitas bangsa. Berdasarkan publikasi UNDP kualitas bangsa Indonesia masih belum maksimal dan lebih rendah dibanding bangsa lain disebabkan belum maksimalnya angka melek huruf (Priyanto, 2010 : 54)

Kedua, Kabupaten Purwakarta merupakan daerah peripheri atau daerah penunjang dari dua kota yaitu Jakarta dan Bandung karena secara geografis letaknya tidak terlalu berjauhan, Kabupaten Purwakarta memiliki luas sekitar 971,72 km² dengan Populasi penduduk sampai tahun 2017 mencapai 912.708 jiwa dengan tingkat kepadatan 939 jiwa/km². Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, hal ini ditunjang dengan adanya data yang menyebutkan tingkat pendidikan yang ditamatkan hingga sekolah dasar menjadi dominan yaitu sebesar 15,37 % selain daripada itu masyarakat dengan kriteria tidak mempunyai ijazah pun menjadi peringkat kedua setelah

minimnya capaian pendidikan hingga sekolah dasar.

Ketiga, belum optimalnya kegiatan penyelenggaraan literasi masyarakat menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 - 2023, untuk mengatasi hal tersebut Kabupaten Purwakarta harus menciptakan pelayanan perpustakaan yang berkualitas dan menerapkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Salah satunya dengan implementasi pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Keempat, Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kabupaten Purwakarta mulai aktif sebagai penggerak literasi pada tahun 2016. Ada 2 aturan yang menjadi landasan penyelenggaraan taman bacaan diantaranya Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dan Perda No. 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013 melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dinas Pendidikan berkewajiban untuk melaksanakan Pendirian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan layanan taman bacaan, kemudian Perda Kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2012 menyatakan bahwa taman bacaan sebagai mitra dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pemustaka, pembinaan serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Taman bacaan tidak dapat berkembang bila agen pelaksana tidak mempunyai keahlian dalam berkomunikasi dengan baik, komunikasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga terjadinya kesalahpahaman (*overlapping*) tugas dan fungsi organisasi dapat diminimalisir, Selain dari Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta juga ada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berperan sebagai Fasilitator dalam penyelenggaraan kegiatan literasi sosial, namun keadaan saat ini belum ada perhatian khusus dari organisasi perangkat daerah untuk program pengembangan taman bacaan sehingga peran pemerintah terhadap pelayanan masyarakat kurang memberikan dampak positif. Implementasi program taman bacaan sejatinya mengedepankan kreatifitas dan inovasi masyarakat lingkungan sosial yang merupakan target penyelenggaraan taman bacaan untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui minat baca namun dalam prakteknya taman bacaan yang kurang baik aspek

pengelolaan dan penyediaan bahan bacaan sulit untuk menarik minat baca sehingga partisipatif masyarakat akan program pemerintah belum menjadi prioritas.

2. LANDASAN TEORI Kebijakan Publik

Peneliti mengutip beberapa pendapat dari para pakar mengenai definisi kebijakan publik (Winarno, 2012) diantaranya :

1. *Whatever government choose to do or not to do*, apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Thomas Dye, 1981)
2. Arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang atau beberapa aktor guna mengatasi masalah (James E. Anderson, 1979).

Berdasarkan pengertian kebijakan publik sebagaimana dipaparkan, maka kebijakan publik dibuat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dalam penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Purwakarta ditujukan untuk dapat memecahkan suatu masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu salah satunya untuk melayani masyarakat dengan mendekatkan dan mudah mendapatkan akses informasi khususnya buku guna mewujudkan minat baca.

Implementasi Kebijakan

Peneliti mengutip beberapa pendapat dari para pakar mengenai definisi implementasi (Mulyadi, 2016), antara lain: Ripley dan Franklin (Winarno, 2014) berpendapat bahwa: "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan, yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata". Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud dari tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Model implementasi yang dirumuskan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) disebut dengan *a model of the policy implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Agustino, 2016). Menurut Van Metter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu: (1) Standar dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Disposisi, (5) Komunikasi (6) Ekonomi, Sosial dan Politik.

Jadi implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran itu sendiri. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memberikan dampak atau hasil yang positif bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut mampu diimplementasikan dengan efektif dan efisien.

Kebijakan Pengembangan Taman Bacaan di Kabupaten Purwakarta

Dengan adanya kebijakan pengembangan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang dalam implementasinya didasari oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, juga dalam pelaksanaannya taman bacaan diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Adapun dalam penerapannya, telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Bupati Purwakarta, 2012; Kemdikbud RI, 2013; Presiden RI, 2007; Kemendikbud RI, 2013).

Fenomena terhadap implementasi kebijakan pengembangan taman bacaan di Kabupaten Purwakarta, dipengaruhi oleh enam dimensi yang saling terkait satu sama lain dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan seperti yang diteoremdikan oleh Van Metter dan Van Horn, yaitu standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, keenam dimensi tersebut sangat terkait dengan tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang peneliti lakukan.

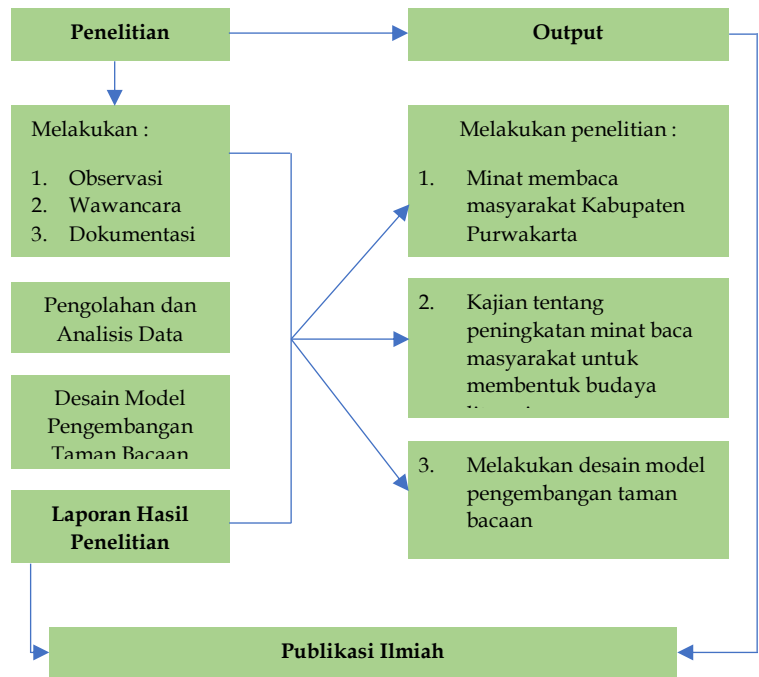
Keberhasilan Implementasi kebijakan pengembangan taman bacaan saat ini salah satunya dihadapkan pada peranan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi sangat penting dan strategis. Dalam konteks ini tentu harus ada pemahaman dan kemauan yang tinggi disertai dengan komitmen dari semua pihak, baik

Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakatnya, karena esensi dari otonomi daerah adalah berorientasi pada satu tujuan, yaitu membangun negara Indonesia melalui pemberdayaan daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Oleh karena itu, minat dan kebiasaan membaca perlu dipupuk, dibina dan dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pembinaan minat baca seyogyanya memang dimulai dari lingkungan keluarga, karena peranan orangtua sangat menentukan bagi pertumbuhan minat baca anak sejak dini. Bilamana situasi seperti ini dapat dikondisikan secara baik, maka selanjutnya peran dan fungsi perpustakaan dapat dilakukan secara lebih intensif. Dengan begitu, maka kebiasaan membaca sesungguhnya menjadi tanggung-jawab pemerintah dan masyarakat yang didalam pembinaan dan pengembangannya melibatkan berbagai pihak terkait, diantaranya mulai dari orangtua dalam keluarga, guru, pengarang, penerbit toko buku, pustakawan, organisasi atau praktisi dan juga pihak swasta serta pemerintah, harus secara sinergis mengupayakannya. Selain sebagai alternatif pelayanan pendidikan nonformal, tujuan dan manfaat penyelenggaraan taman bacaan adalah memperkenalkan variasi buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat secara periodik, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus sebagai upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta.

3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis kualitatif, dengan upaya menggambarkan kondisi eksisting penyelenggaraan layanan taman bacaan yang menjadi tempat atau wahana edukatif yang berlokasi di tengah - tengah masyarakat Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut, yaitu: (1) mendeskripsikan secara mendalam penyebab rendahnya minat baca masyarakat (2) mendiagnosis berbagai penyebab rendahnya minat membaca masyarakat, dan (3) menemukan model kegiatan membaca yang dapat mendorong masyarakat agar mau membaca sehingga terwujud budaya literasi (*long life - learning*).



Gambar 2. Alur Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara, rekam data dan rekam gambar. Kegiatan observasi ini digunakan untuk mengetahui gambaran awal tentang kondisi lokasi penelitian dan objek yang akan diteliti. Wawancara digunakan untuk menggali dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan data yang diteliti. Selanjutnya rekam data dan gambar bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai hal yang ditemui di lapangan sebagai kelengkapan data yang dapat menunjang dan menambah berbagai macam informasi yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara: data-data dari penelitian berupa rekaman wawancara dan observasi, akan dipindahkan atau ditranskripsikan dalam bentuk *field note* (catatan lapangan). Setelah itu data - data tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema. Selain itu juga peneliti akan menggunakan data kepustakaan guna melengkapi informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Purwakarta terletak antara 107^o 30' - 107^o 40' Bujur Barat dan 6^o 25' - 6^o 45' Lintang Selatan dan memiliki luas 97.172 ha atau sekitar 2,81% dari luas Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah:

Jumlah	51,56	48,44	100,00
--------	-------	-------	--------

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor

Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

Masalah Rendahnya Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari rata - rata lama sekolah, drop out dan masyarakat yang belum melek huruf dimana pembangunan sosial dengan tujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang fokusnya kepada manusia berupaya untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM, Betapa pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dimana sumberdaya manusia merupakan aset bagi pembangunan di daerah. Namun kesadaran akan pentingnya pendidikan belum dijadikan prioritas bagi sebagian masyarakat.

Seperti data yang disebutkan pada tabel IV.2 mengenai presentase penduduk kabupaten purwakarta menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2017 masih banyak penduduk yang tidak punya ijazah dari penduduk laki laki ada 13,27 % penduduk tidak punya ijazah dan 13,76 % penduduk perempuan tidak punya ijazah sekolah pendidikan formal.

Tabel IV.4

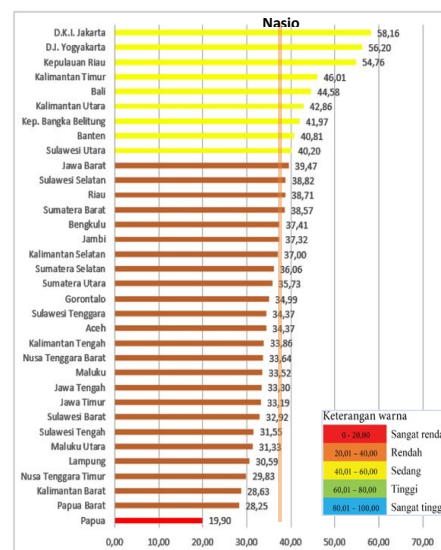
Persentase Penduduk Kabupaten Purwakarta Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017

Pendidikan ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak punya ijazah	13,27	13,76	27,03
SD sederajat	15,37	15,26	30,63
SMP sederajat	8,77	8,84	17,61
SMA sederajat	11,89	8,57	20,47
Diploma/Sarjana	2,14	1,99	4,13
Pascasarjana	0,11	0,03	0,13

Sumber : Data lengkap pada publikasi Purwakarta Dalam Angka Tahun 2017.

Tingkat pendidikan adalah salah satu hal yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selain kualitas kesehatan dan kondisi ekonomi (pendapatan). Dalam mengakses pembangunan manusia di bidang pendidikan, indikator yang digunakan adalah angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Persentase melek huruf digunakan untuk melihat sejauh mana suatu daerah mampu memberantas buta aksara, sehingga masyarakat dapat mengakses bahan-bahan literasi dan semakin tinggi bebas buta huruf latin serta semakin lama rata - rata lama sekolah masyarakat di suatu daerah, maka dianggap semakin baik kondisi kecakapan literasi masyarakatnya. Besarnya persentase masyarakat yang telah melek huruf, sebagaimana lazimnya yang terjadi di banyak negara maka asumsinya persentase kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan bacaan berkorelasi signifikan. Logikanya, semakin banyak orang yang bisa membaca maka jumlah bahan bacaan yang dihasilkan meningkat. Akan tetapi realisasi tidaklah demikian. Berdasarkan data UNDP (United Nations Development Programme, 2012) persentase akses masyarakat terhadap koran hanya 2,8 persen. Tahun 2019 rasio jumlah penduduk dengan surat kabar di Indonesia hanya 1 : 43 alias satu surat kabar dibaca oleh 43 orang. Bandingkan dengan Malaysia (1 : 8,1), Jepang (1 : 1,74), serta India (1: 38,14).



Grafik 2 Indeks aktivitas literasi membaca

Sumber : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Hasil perhitungan indeks provinsi pada Grafik I.2 di atas menunjukkan peringkat 3 provinsi dengan nilai indeks tertinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan angka indeks 58,16; D.I. Yogyakarta dengan angka 56,20; dan Kepulauan Riau dengan angka 54,76. Meskipun demikian, tiga provinsi tersebut belum mencapai kategori aktivitas literasi tinggi karena indeks ketiganya belum melampaui angka 60,01 atau dengan kata lain masih berada di level aktivitas literasi sedang. Di peringkat terendah ialah Provinsi Papua dengan angka indeks 19,90 dan termasuk kategori aktivitas literasi sangat rendah (berada pada rentang angka 0 - 20,00); kemudian Papua Barat dengan angka 28,25 dan Kalimantan Barat dengan angka 28,63 - keduanya termasuk kategori rendah (rentang 20,01 - 40,00).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan taman bacaan di Kabupaten Purwakarta belum optimal, dalam hal ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri memberantas rendahnya angka melek huruf dan minat baca masyarakat, perlu adanya penanganan yang tepat guna agar kesenjangan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah dapat terselesaikan atas dasar tujuan bersama.

Persoalan rendahnya budaya baca merupakan salah satu isu penting dalam memahami rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki budaya baca tinggi diyakini akan memiliki tingkat literasi yang tinggi pula. Namun untuk mendorong agar masyarakat memiliki budaya baca tinggi diperlukan beberapa prasyarat.

Dari hasil penelusuran informasi dengan teknik wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pemustaka, pembinaan serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat pemerintah daerah mengupayakan pendirian taman baca sehingga dapat menumbuhkan minat baca disemua lapisan masyarakat, Namun hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja taman baca belum menjadi wahana edukatif masyarakat karena adanya keterbatasan peluang, materi juga akses terhadap bahan bacaan.

Dengan luas 97.172 ha Kabupaten Purwakarta memiliki 17 kecamatan guna mendukung program pembangunan daerah salah satunya pada bidang

pendidikan nonformal yaitu dengan didirikannya taman baca masyarakat, namun data menyebutkan bahwa di Kabupaten Purwakarta hanya ada 11 taman baca yang aktif melayani pemustaka untuk tetap bisa menikmati bahan bacaan-nya meski jauh dari perpustakaan daerah. Pemerintah mengadakan program MoU dengan beberapa taman baca sebagai alternatif pengembangan bahan bacaan agar proses sirkulasi peminjaman dapat beragam, hal ini menjadi sangat efisien mengingat kebutuhan akan informasi pada taman baca menjadi lebih terkoordinir secara berkala sehingga proses pembelajaran sepanjang hayat (*long - life learning*) dapat dilaksanakan. Namun belum banyak taman baca di Kabupaten Purwakarta mendapatkan fasilitas tersebut, terbukti dari hasil wawancara dengan kepala seksi layanan perpustakaan sejauh ini hanya ada 3-4 taman baca yang sudah MoU dikarenakan keterbatasan sarana guna pemenuhan kebutuhan taman baca.

Dari hasil penelitian mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat harus berpijak dari adanya 'kemampuan membaca'. Kemampuan atau kecakapan membaca (*proficiency*) merupakan syarat awal untuk mengakses bacaan. Setelah memiliki kecakapan membaca, maka langkah selanjutnya ialah membina 'kebiasaan membaca'. Upaya membina kebiasaan membaca itu tidak dapat terlaksana tanpa tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya. Sehingga budaya baca tidak dapat tumbuh dengan sendirinya, melainkan memerlukan beberapa komponen, antara lain: (1) kemampuan membaca, (2) tersedianya bahan bacaan, dan (3) pembinaan kebiasaan membaca. Sehingga kesadaran akan pentingnya membangun literasi sejak dini diakui memang belum menjadi prioritas masyarakat Kabupaten Purwakarta hal ini berdampak pada banyaknya anak - anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya, kepedulian rendah akan minat baca sehingga pengembangan diri tidak terasah secara maksimal. Kiat - kiat yang dapat dilakukan yaitu perlu adanya gebragan untuk membangun sebuah wadah yang dapat menjadi sarana edukatif, rekreatif dan inovatif sehingga masyarakat bisa menambah ilmu pengetahuan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan juga dekat dengan pemukiman. Adapun usulan model dalam penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman bacaan (TBM) di Kabupaten Purwakarta" adalah sebagai berikut : Perlu adanya (1) kesadaran akan pentingnya nilai budaya literasi di masyarakat, sehingga masyarakat merasa butuh informasi guna peningkatan kemampuan individu/kelompok (2) adanya dukungan dari

SDM unggul yang bisa menyumbangkan ide/gagasan juga inovasinya guna pengembangan budaya literasi masyarakat menjadi lebih atraktif, sumberdaya non-manusia dibutuhkan sebagai sarana penunjang kegiatan layanan taman bacaan (3) terkait dengan penyelenggaraan layanan taman bacaan yang dekat dengan pemukiman menjadi penting bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki akan sarana taman bacaan sehingga kinerja dapat berjalan optimal. (4) Terjalannya layanan taman bacaan efektif tidak terlepas dari adanya komunikasi aktif diantara para implementor aturan pengembangan budaya literasi, sehingga layanan taman bacaan sebagai alternatif kegiatan pembelajaran seumur hidup (*long - life learning*) dapat berjalan dengan baik maka dari itu penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses pembangunan masyarakat.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Purwakarta disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dimensi standar dan tujuan kebijakan belum selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pemustaka, pembinaan serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat pemerintah daerah mengupayakan pendirian taman bacaan sehingga dapat menumbuhkan minat baca disemua lapisan masyarakat, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja taman bacaan belum menjadi wahana edukatif masyarakat karena adanya keterbatasan peluang, materi juga akses terhadap bahan bacaan. Dan pada dimensi sumberdaya implementasi kebijakan belum didukung oleh kuantitas dan kualitas staf, fasilitas dan informasi yang memadai. Kemudian pada dimensi karakteristik agen pelaksana yang terikat dengan pola - pola hubungan organisasi berjalan dengan baik dan mendukung segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan hasil kolaborasi dengan warga sekitar taman baca. Hal ini selaras dengan sikap implementor yang menerima adanya kebijakan kegiatan layanan taman baca meskipun aspek pengaturan birokrasi dan pemberian insentif belum dilakukan. Atas dasar *awareness* pegiat literasi maka segala bentuk kegiatan didasarkan pada efektivitas dan efisiensi pengelola taman baca untuk dapat menarik perhatian

masyarakat agar gemar dalam membaca sehingga komunikasi disampaikan secara inovatif dan kreatif namun karena keterbatasan ekonomi, faktor lingkungan belum berperan besar dalam memberikan sarana/prasarana sehingga cukup sulit sebuah taman baca akan berkembang secara optimal.

2. Terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai pada proses penyelenggaraan layanan taman bacaan, pemerintah daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta mengadakan kegiatan MoU peminjaman buku pustaka dengan agenda sirkulasi diadakan setiap per - 3 bulan
3. Untuk mewujudkan tujuan bersama dalam peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Purwakarta direkomendasikan adanya usulan model implementasi kebijakan pengembangan taman bacaan masyarakat pada dimensi komunikasi dengan melibatkan pihak - pihak terkait.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta Bandung.
- Haklev, Stian. 2008. *Mencerdaskan Bangsa-Suatu Pertanyaan Fenomena Taman Baca Di Indonesia*. University of Toronto at Scarborough.
- Kalida, Muhsin. 2012. *Fundraisng Taman Baca Masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cangkruck Publishing.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. (Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas, Penerjemah). Jakarta : Diperta Islam Depag RI.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Sutarno, NS. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.

- Sutarno, NS. 2006. *Manajemen Perpustakaan (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sutarno, NS. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.
- Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. In *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Sage Publications, Inc.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. PT Buku Seru.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.